

ANALISIS KETIMPANGAN REGIONAL DI SULAMPUA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

I Wayan Stivan Styawan¹, Syarwani Canon², Rifi Fazrina Djuuna³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo Indonesia¹²³

E-mail ¹: wayanstivanstyawan@gmail.com

Abstract: Research on regional inequality in the Sulawesi, Maluku, and Papua (Sulampua) region is relatively limited compared to other regions in Indonesia. This study aims to analyze the level of regional inequality in the Sulampua region and identify the factors that influence it. The data used are secondary data obtained from official publications of the Central Statistics Agency for the period 2015–2024. The analytical methods used include the Williamson Index to measure the level of regional inequality and panel data regression to analyze the influence of independent variables on regional inequality using the best approach, namely the Fixed Effect Model (FEM). The independent variables in this study consist of GRDP per capita, population, the Human Development Index (HDI), and the Open Unemployment Rate (TPT), while the dependent variable is regional inequality. The results show that the level of regional inequality in the Sulampua region varies across provinces. High levels of inequality are found in Papua, West Papua, Central Sulawesi, South Sulawesi, North Maluku, and North Sulawesi. Southeast Sulawesi, Maluku, and West Sulawesi have moderate levels of inequality, while Gorontalo has low levels. Model estimation results show that GRDP per capita has a positive and significant effect on regional inequality, while the HDI and TPT have a negative and significant effect. Meanwhile, population size does not significantly affect regional inequality in the Sulampua region.

Keywords: Regional Inequality, GRDP per Capita, Population, Human Development Index (HDI), Open Unemployment Rate (OUR).

Abstrak: Penelitian mengenai ketimpangan regional di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) relatif terbatas dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan regional di kawasan Sulampua serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik selama periode 2015–2024. Metode analisis yang digunakan meliputi Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan regional dan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan regional dengan pendekatan terbaik, yaitu Fixed Effect Model (FEM). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas PDRB per kapita, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan variabel dependennya adalah ketimpangan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan regional di wilayah Sulampua bervariasi antarprovinsi. Tingkat ketimpangan tinggi terdapat di Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Tingkat ketimpangan sedang terdapat di Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Barat, sedangkan Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan rendah. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional, sedangkan IPM dan TPT berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua.

Kata Kunci: Ketimpangan Regional, PDRB per Kapita, Jumlah Penduduk, IPM, TPT.

PENDAHULUAN

Ketimpangan regional merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketimpangan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan tidak tersebar merata antarwilayah akibat perbedaan sumber daya alam, kondisi geografis, kapasitas fiskal, dan kemampuan pengelolaan ekonomi daerah (Finuliyah & Khusaini, 2022). Kondisi ini menyebabkan sebagian wilayah berkembang pesat, sementara wilayah lain masih tertinggal. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pemerataan pembangunan serta memicu kesenjangan sosial dan ekonomi (Adryawning dan Widiyanto, 2025).

Fenomena ketimpangan regional juga terlihat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Meskipun pertumbuhan ekonomi di kawasan ini cenderung meningkat, perbedaan PDRB per kapita antarprovinsi menunjukkan masih adanya ketimpangan regional. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto ADHK Per Kapita Provinsi di Sulampua Tahun 2015-2024 (juta rupiah/jiwa)

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	29,20	30,68	32,30	34,05	35,70	33,61	34,79	36,39	38,06	39,82
Sulawesi Tengah	28,78	31,15	32,86	34,51	36,49	44,93	50,18	57,26	63,31	68,00
Sulawesi Selatan	29,46	31,30	33,23	35,35	37,49	36,17	37,50	38,98	40,29	41,86
Sulawesi Tenggara	29,20	30,48	31,89	33,67	35,32	33,46	37,06	38,59	39,99	40,81
Gorontalo	19,47	20,43	21,48	22,91	24,17	24,26	24,65	25,39	26,08	26,84
Sulawesi Barat	20,25	21,07	22,00	23,22	24,19	22,67	22,90	23,06	23,9	24,67
Maluku	14,71	15,32	15,94	16,84	17,59	15,81	17,24	17,96	18,64	19,12
Maluku Utara	17,46	18,18	19,19	20,55	21,51	20,68	25,52	30,97	36,78	40,68

Papua Barat	59,76	61,24	62,17	64,23	64,02	51,09	54,04	54,40	3,51	41,05
Papua	41,32	44,34	45,58	48,42	40,24	30,33	36,87	39,69	11,19	11,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 1, terdapat perbedaan nilai PDRB per kapita setiap provinsi di setiap tahunnya. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan dan aktivitas ekonomi di Sulampua belum terdistribusi secara merata antarprovinsi sehingga mengindikasikan adanya ketimpangan regional. Perbedaan PDRB per kapita antarwilayah tidak hanya mencerminkan variasi kapasitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk di masing-masing provinsi, sehingga peran jumlah penduduk menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam memahami pola ketimpangan regional. Jika kita mengamati, ada peningkatan jumlah penduduk setiap provinsi yang ada di Sulampua dan terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya, seperti yang telah disajikan pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Jumlah Penduduk antar Wilayah di Sulampua Tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	2412,1	2436,9	2461	2474,4	2494,1	2621,9	2638,6	2659,5	2681,5	2701,8
Sulawesi Tengah	2876,7	2921,7	2966,3	3001,9	3042,1	2985,7	2985,7	3015	3051,2	3121,8
Sulawesi Selatan	8512,6	8606,4	8690,3	8748,1	8819,5	9073,5	9156,9	9260,1	9362,3	9463,4
Sulawesi Tenggara	2499,5	2551,0	2602,4	2623,6	2663,7	2793,1	2624,9	2659,9	2704,6	2793,1
Gorontalo	1133,2	1150,8	1168,2	1166,1	1176,4	1171,7	1180,9	1192,7	1213,2	1227,8
Sulawesi Barat	1282,1	1306,5	1331	1340,1	1359,2	1414,6	1436,7	1458,9	1481,1	1503,2
Maluku	1690,3	1715,5	1744,7	1749,5	1768,5	1945,6	1848,9	1869,5	1895,1	1945,6
Maluku Utara	1167,1	1185,9	1209,3	1218,8	1235,7	1355,6	1282,9	1299,5	1318,5	1355,6
Papua Barat	876,0	893,4	915,4	941,4	969,6	1205,8	1134,1	1149,4	1168,4	1205,6
Papua	3153,8	3207,4	3265,2	3300,2	3347,1	4542,6	4303,7	4356,8	4429,7	4542,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain memengaruhi dinamika ekonomi wilayah, jumlah penduduk juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula tuntutan terhadap ketersediaan Pendidikan yang memadai, kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penting untuk melihat sejauh mana kapasitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Berikut ini merupakan data IPM antarwilayah di Sulampua.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia antar Wilayah di Sulampua Tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99	73,67	74,03	74,52	75,04	75,68
Sulawesi Tengah	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50	70,31	70,54	71,01	71,66	72,24
Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	73,08	73,38	73,96	74,60	75,18
Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20	71,61	71,82	72,38	72,94	73,62
Gorontalo	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49	69,51	69,82	70,62	71,25	72,01
Sulawesi Barat	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73	68,40	68,64	69,19	69,80	70,46
Maluku	67,05	67,60	68,19	68,87	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75	73,40
Maluku Utara	65,91	66,63	67,20	67,76	68,70	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84
Papua Barat	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,94	66,11	66,03	66,84	67,69
Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	61,22	61,40	72,57	73,23	73,83

Sumber: Badan Pusat Statistak, 2025

Dalam analisis ketimpangan regional, IPM tidak hanya menunjukkan kualitas pembangunan manusia, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi pasar kerja. Ketika peningkatan kualitas manusia tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang memadai, tercermin dari tingginya TPT, maka ketimpangan antarwilayah dapat semakin melebar. Sehingga, TPT menjadi salah satu indikator penting yang digunakan sebagai tolak ukur menilai ketimpangan. Tabel berikut menyajikan data TPT antar wilayah di Sulampua.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka antar Wilayah di Sulampua Tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	9,03	6,18	7,18	6,61	6,01	7,37	7,06	6,61	6,10	5,85
Sulawesi Tengah	4,10	3,29	3,81	3,37	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95	2,94
Sulawesi Selatan	5,95	4,80	5,61	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
Sulawesi Tenggara	5,55	2,72	3,30	3,19	3,52	4,58	3,92	3,36	3,15	3,09
Gorontalo	4,65	2,76	4,28	3,70	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13
Sulawesi Barat	3,35	3,33	3,21	3,01	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
Maluku	9,93	7,05	9,29	6,95	6,69	7,57	6,39	6,88	6,31	6,11
Maluku Utara	6,05	4,01	5,33	4,63	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03
Papua Barat	8,08	7,46	6,49	6,45	6,43	6,80	5,84	5,37	5,38	4,13
Papua	3,99	3,35	3,62	3,00	3,51	4,28	3,33	2,83	2,67	6,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Penelitian mengenai ketimpangan regional antar wilayah di Sulampua penting dilakukan karena hasil pembangunan provinsi belum tersebar secara merata, meskipun wilayah tersebut baru-baru ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat. Ketimpangan terlihat dari perbedaan nilai PDRB per kapita, Jumlah Penduduk, IPM dan TPT yang mencerminkan adanya kesenjangan kesejahteraan antarwilayah (Wahyuni & Andriyani, 2022), (Zusanti et al., 2020). Kondisi ini dapat menimbulkan masalah sosial, migrasi tenaga kerja, dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya (Krisnandita, 2023). Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada tingkat nasional atau pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Sementara itu, wilayah Sulampua yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan geografis yang unik masih relatif kurang mendapat perhatian dalam konteks ketimpangan regional. Dalam rangka menyediakan dasar empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan yang setara dan inklusif, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan regional di Sulampua. Maka, peneliti perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ketimpangan Regional di Sulampua dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang meliputi provinsi-provinsi di kawasan Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan regional di Sulampua guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan di Indonesia. Seluruh analisis didasarkan pada pemanfaatan data sekunder dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. PDRB perkapita, Jumlah Penduduk, IPM, dan TPT merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui berbagai publikasi resmi yang disediakan oleh BPS serta sejumlah instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam menyediakan informasi statistik dan dokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang dipilih adalah deskriptif dan kausal. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan regional antar wilayah di Sulampua, sedangkan pendekatan kausal digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketimpangan tersebut. Teknik dokumentasi, yang melibatkan pencarian, pengumpulan dan pencatatan data sekunder secara metodis dengan tujuan penelitian, digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data dalam studi ini.

Penelitian ini mengukur tingkat ketimpangan regional dengan menggunakan Indeks Williamson, yang perhitungannya didasarkan pada formula berikut (Sjafrizal, 2012).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \cdot f_i/n}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB perkapita wilayah i (Provinsi)
- \bar{Y} = PDRB perkapita seluruh wilayah
- F_i = Jumlah penduduk wilayah i (Provinsi)
- n = Jumlah penduduk seluruh wilayah

Adapun formula untuk menghitung ketimpangan antarprovinsi berdasarkan Indeks Williamson dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Tingkat ketimpangan regional antarwilayah dikategorikan rendah apabila nilai $IW < 0,3$.
- 2) Tingkat ketimpangan regional antarwilayah dikategorikan sedang apabila nilai IW berada pada kisaran $0,3$ hingga $0,5$.
- 3) Tingkat ketimpangan regional antarwilayah dikategorikan tinggi apabila nilai IW berada pada kisaran $0,5$ hingga 1 .

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi menggunakan data panel. Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk memastikan apakah variabel dependen dan independen saling berhubungan. Koefisien Determinasi (R^2) dimanfaatkan untuk mengevaluasi seberapa baik model mendeskripsikan variabel dependen, uji F digunakan untuk mencari efek simultan, uji t digunakan untuk mencari efek parsial.

HASIL PENELITIAN

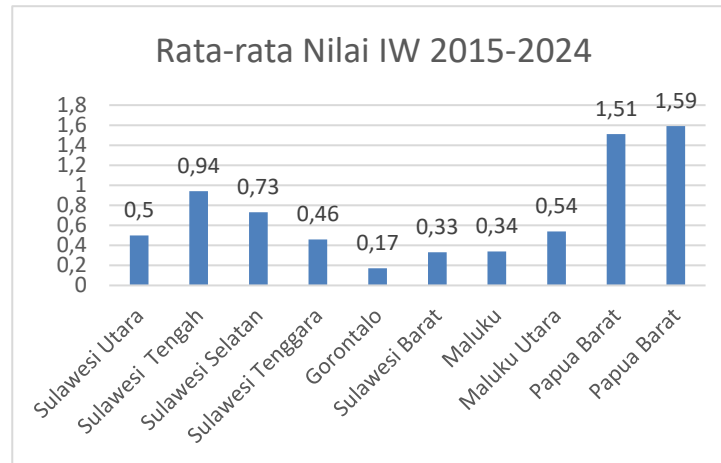
A. Hasil Indeks Williamson

Tabel 5. Indeks Williamson Antar Provinsi di Sulampua Tahun 2015-2024

Provinsi	Indeks Williamson (IW)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	0.49	0.5	0.5	0.5	0.5	0.49	0.5	0.5	0.5	0.51
Sulawesi Tengah	0.47	0.51	0.54	0.57	0.61	1.11	1.24	1.36	1.46	1.53
Sulawesi Selatan	0.68	0.68	0.68	0.69	0.71	0.77	0.77	0.77	0.79	0.8
Sulawesi Tenggara	0.44	0.43	0.45	0.45	0.45	0.42	0.49	0.47	0.48	0.48
Gorontalo	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
Sulawesi Barat	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32
Maluku	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.43	0.44	0.44	0.42	0.43
Maluku Utara	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.36	0.58	0.91	1.06	1.1
Papua Barat	1.53	1.51	1.47	1.47	1.46	1.49	1.45	1.44	1.56	1.7
Papua	2.06	2.16	2.13	2.26	1.52	1.11	1.84	1.99	0.43	0.43

Sumber: Ouput Excel olahan peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1, diperoleh rata-rata nilai indeks Williamson setiap provinsi yang ada di Sulampua selama 10 tahun disajikan dalam diagram berikut.



Sumber: Output Excel olahan peneliti, 2025

Gambar 1. Rata-Rata Indeks Williamson Tahun 2015-2024

Berdasarkan gambar 1, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Papua memiliki rata-rata tingkat ketimpangan tertinggi di wilayah Sulampua, dengan nilai Indeks Williamson sebesar 1,59. Papua Barat juga termasuk dalam kategori ketimpangan sangat tinggi, dengan rata-rata nilai sebesar 1,51. Nilai Indeks Williamson yang melebihi 1 menunjukkan adanya perbedaan PDRB per kapita yang sangat besar antarwilayah, yang umumnya dipengaruhi oleh konsentrasi aktivitas ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya aksesibilitas. Selanjutnya, beberapa provinsi tergolong dalam kategori ketimpangan tinggi, yaitu Sulawesi Tengah (0,94), Sulawesi Selatan (0,73), Maluku Utara (0,54), dan Sulawesi Utara (0,50). Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut belum merata dan masih terpusat di daerah tertentu. Adapun provinsi dengan kategori ketimpangan sedang meliputi Sulawesi Tenggara (0,46), Maluku (0,34), dan Sulawesi Barat (0,33). Tingkat ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi mulai terjadi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, Gorontalo menjadi satu-satunya provinsi dengan kategori ketimpangan rendah, dengan nilai rata-rata sebesar 0,17, yang menunjukkan distribusi aktivitas ekonomi yang relatif lebih merata. Secara umum, semakin terpusat aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu, semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam mengurangi ketimpangan regional.

B. Hasil Regresi Data Panel

1. Pemilihan Model Regresi

a. Uji Chow

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan	Model Terpilih
51.01	0.0000	Prob < 0,05	Fixed Effect

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

Berdasarkan hasil Uji Chow, didapatkan nilai F-statistic sebesar 26.36 dengan nilai probabilitas adalah sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai alfa 5% ($\alpha = 0.05$). Dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa model yang baik untuk digunakan adalah model *Fixed Effect*.

b. Uji Hausman

Tabel 7. Hasil Uji Hausman

Nilai Statistik	Probabilitas	Keputusan	Model Terpilih
206.72	0.0000	Prob < 0,05	Fixed Effect

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

Berdasarkan hasil Uji Hausman, didapatkan nilai F-statistic sebesar 206.72 dengan nilai probabilitas adalah sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai alfa 5% ($\alpha = 0.05$). Dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa model yang baik untuk digunakan adalah model *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect*.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih adalah FEM, maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF	Kesimpulan
PDRB Perkapita	1.09	0.920450	Lolos Uji Multikolinearitas
Jumlah Penduduk	1.15	0.872854	Lolos Uji Multikolinearitas
IPM	1.14	0.873981	Lolos Uji Multikolinearitas
TPT	1.01	0.991271	Lolos Uji Multikolinearitas

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai VIF variabel independen X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 lebih kecil dari batas yang ditetapkan yaitu 8.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas atau dengan kata lain lolos uji multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Keterangan	Nilai
Chi-Square	2.16
Probabilitas	0.1418
Kesimpulan	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1418. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 ($0.1418 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau dengan kata lain lolos uji heteroskedastisitas.

3. Persamaan Regresi Data Panel Fixed Effect.

Tabel 10. Hasil Estimasi FEM

Variabel	Koefisien	t-stat	Signifikansi
PDRB Perkapita	0.02594	10.14	0.000
Jumlah Penduduk	0.00008	1.56	0.121
IPM	-0.01638	-2.55	0.013
TPT	-0.54881	-2.56	0.012
cons	1.03821	1.92	0.059

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, maka model data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$KR = 1.03821 + 0.02594PDRBCap + 0.00008JP - 0.01638IPM - 0.05488TPT + \varepsilon_{it}$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 1.03821 artinya tanpa adanya variabel PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka, maka Ketimpangan Regional akan mengalami peningkatan sebesar 1.03821%
- Nilai koefisien beta variabel PDRB Perkapita sebesar 0.02594. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB Perkapita mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional akan mengalami peningkatan sebesar 2,594%. Begitu pula sebaliknya, Jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB Perkapita mengalami penurunan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional juga akan mengalami penurunan sebesar 2,594%
- Nilai koefisien beta variabel Jumlah Penduduk sebesar 0,00008. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel Jumlah Penduduk mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional akan mengalami peningkatan sebesar 0,008%. Begitu pula sebaliknya, Jika nilai variabel lain konstan dan variabel Jumlah Penduduk mengalami penurunan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional juga akan mengalami penurunan sebesar 0,008%.
- Nilai koefisien beta variabel IPM, sebesar 0,01638. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel IPM mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional akan mengalami penurunan sebesar 1,638%. Begitu pula sebaliknya, Jika nilai variabel lain konstan dan variabel IPM mengalami penurunan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional akan mengalami peningkatan sebesar 1,638%
- Nilai koefisien beta variabel TPT sebesar 0,05488. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel TPT mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional akan mengalami penurunan sebesar 5,488%. Begitu pula sebaliknya, Jika nilai variabel lain konstan dan variabel TPT mengalami penurunan sebesar 1%, maka Ketimpangan Regional akan mengalami peningkatan sebesar 5,488%

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji T

Tabel 11. Hasil Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	Keputusan
PDRB Perkapita	10.14	1.98	Berpengaruh signifikan (+)
Jumlah Penduduk	1.56	1.98	Tidak Berpengaruh
IPM	-2.55	1.98	Berpengaruh signifikan (-)
TPT	-2.56	1.98	Berpengaruh signifikan (-)

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

- 1) Hasil uji T pada variabel PDRB Perkapita (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar 10.14 > t tabel 1.98 dan nilai sig. 0.000 < 0.05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua.
- 2) Hasil uji T pada variabel Jumlah Penduduk (X_2) diperoleh nilai t hitung sebesar 1.56 < t tabel 1.98 dan nilai sig. 0.121 > 0.05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua.
- 3) Hasil uji T pada variabel IPM (X_3) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.55 > t tabel 1.98 dan nilai sig. 0.013 < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua.
- 4) Hasil uji T pada variabel TPT (X_4) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.56 > t tabel 1.98 dan nilai sig. 0.012 < 0.05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua.

b. Uji F

Tabel 12. Hasil Uji F

F hitung	F tabel	Keputusan
51.01	2.47	Berpengaruh signifikan

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

Nilai F Hitung sebesar 51.01 > nilai F tabel yaitu 2.47 dan nilai signifikansi yaitu 0.000 < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, IPM, dan TPT berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Statistik Model	Nilai
R^2 (within)	0.7035
R^2 (between)	0.4894
R^2 (overall)	0.5426
Obs	100

Sumber: Output STATA17 olahan peneliti, 2026

Dalam model Fixed Effect, nilai koefisien determinasi yang lebih tepat digunakan adalah R^2 (within), karena model ini menekankan pada variasi data dalam masing-masing unit penelitian sepanjang waktu. Oleh karena itu, kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur menggunakan nilai R^2 (within). Nilai R^2 (within) sebesar 0.7035 atau 70.35%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, IPM, dan TPT mampu menjelaskan variabel Ketimpangan di Wilayah Sulampua sebesar 70,35%, sedangkan sisanya yaitu 29,65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson, Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan tingkat ketimpangan regional tertinggi dibandingkan wilayah lain di kawasan Sulampua. Tingginya ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu sehingga manfaat pembangunan belum tersebar secara merata. Salah satu faktor utama penyebab ketimpangan adalah dominasi sektor pertambangan berskala besar, seperti aktivitas pertambangan Freeport di Kabupaten Mimika, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB daerah. Namun, peningkatan output ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan antarwilayah sehingga memunculkan kesenjangan pendapatan yang tinggi.

Selain struktur ekonomi, kondisi geografis Papua dan Papua Barat juga memengaruhi tingginya ketimpangan regional. Topografi yang didominasi pegunungan dan wilayah terpencil menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses distribusi ekonomi menjadi lebih sulit dan mahal. Akibatnya, beberapa wilayah mengalami keterbatasan akses transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perkembangan wilayah lebih terkonsentrasi pada kota-kota tertentu seperti Jayapura, Sorong, dan Manokwari yang memiliki fasilitas dan aksesibilitas lebih baik dibandingkan wilayah pedalaman. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mom et al., 2023) dan (Raafi'i et al., 2018) yang menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan di Papua dan Papua Barat dipengaruhi oleh perbedaan investasi, infrastruktur, aksesibilitas, dan pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Selain Papua dan Papua Barat, provinsi lain yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif tinggi adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Barat berada pada kategori ketimpangan sedang, sedangkan Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan rendah. Perbedaan tingkat ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di kawasan Sulampua masih belum merata karena aktivitas ekonomi dan pusat pertumbuhan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

2. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita cenderung diikuti oleh

meningkatnya ketimpangan antarwilayah. Kondisi tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung secara merata, melainkan lebih terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi yang lebih maju dibandingkan wilayah lainnya. Akibatnya, perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah menjadi semakin besar sehingga memperlebar ketimpangan pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Windriyanti, 2019) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional, di mana peningkatan pendapatan per kapita pada wilayah tertentu dapat memperbesar kesenjangan dengan wilayah yang pertumbuhannya relatif lebih lambat. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Wiza & Puteri, 2023) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak secara langsung menentukan tingkat ketimpangan antarwilayah, karena ketimpangan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti perbedaan pembangunan ekonomi, akses pendidikan, dan karakteristik wilayah perkotaan–perdesaan dibandingkan jumlah penduduk itu sendiri (Juniati et al., 2022).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan temuan (Wahyuni & Andriyani, 2022) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sukma, 2021) serta (Anggina & Artaningtyas, 2017) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka tingkat ketimpangan antarwilayah cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketika kualitas sumber daya manusia meningkat secara merata, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta mengakses kegiatan ekonomi sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Athallah & Bintoro, 2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM mampu menekan tingkat ketimpangan karena pembangunan manusia yang lebih baik mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Helmy et al., 2024), (Aprilianti & Harken, 2021), serta (Kusuma et al., 2019) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Irawan et al., 2024) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.

5. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat, tingkat ketimpangan antarwilayah cenderung menurun. Kondisi ini dapat terjadi karena tingginya tingkat pengangguran tidak hanya terjadi di wilayah tertentu saja, tetapi relatif tersebar di berbagai daerah sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah menjadi tidak terlalu jauh. Selain itu, wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih maju biasanya mampu menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga tingkat penganggurannya relatif lebih rendah dibandingkan daerah yang aktivitas ekonominya masih terbatas (Zusanti et al., 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Aulya, 2016) yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian (Alfiansyah & Budyanra, 2019) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, di mana peningkatan pengangguran dapat memperbesar kesenjangan ekonomi antarwilayah. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah, kondisi perekonomian, serta periode penelitian yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Provinsi dengan kategori ketimpangan tinggi di Sulampua meliputi Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, provinsi yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang di Sulampua adalah Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Barat. Adapun provinsi dengan ketimpangan rendah adalah Gorontalo.
2. PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional, yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita cenderung diikuti oleh meningkatnya tingkat ketimpangan antarwilayah.

3. Jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak secara langsung menentukan tingkat ketimpangan antarwilayah.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka tingkat ketimpangan antarwilayah cenderung menurun.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di wilayah Sulampua. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat, tingkat ketimpangan antarwilayah cenderung menurun.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemerataan antarwilayah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong distribusi aktivitas ekonomi yang lebih seimbang, khususnya melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan infrastruktur di wilayah yang relatif tertinggal. Selain itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia serta memperluas kesempatan kerja, mengingat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat pengangguran terbukti berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai ketimpangan wilayah dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi ketimpangan regional.

Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan dan metode analisis yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif serta mampu memperkaya kajian empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, H., & Budyanra. (2019). Analysis of Interregional Development Inequality. *Seminar Nasional Official Statistics*, 424–429.
- Anggina, D., & Artaningtyas, W. D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 15(1), 13–40.
- Aprilianti, V., & Harken, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi. *Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.111>
- Athallah, T. M. P., & Bintoro, N. S. (2023). Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Regional. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 411–417.
- Aulya, V. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2013 Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 58–70.
- Helmy, A., Nujum, S., & Selong, A. (2024). Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 2024–2907.
- Irawan, D., Wijumulawani, B. S., & Hak, M. B. (2024). Investasi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 623–633.
- Juniati, W., Abdullah, M. L., & Wibowo, M. G. (2022). Determinants of Income Inequality Villages and Cities in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 7(2), 266–279. <https://doi.org/10.20473/jde.v7i2.33980>
- Krisnandita, I. W. (2023). Determinants of Migration Flows in Highly Skilled Migrants Interprovince in Indonesia. *Populasi*, 31(1), 13–30. <https://doi.org/10.22146/jp.84371>
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, D. S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(3), 282–293.
- Mom, R., Rante, H., & Julison, B. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Wilayah terhadap Pembangunan di Kabupaten Puncak Papua. *Jurnal ELIPS*, 6(3), 127–132.

Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat [Inequality of Development Between Regions of Development in West Papua Province]. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 244.

Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Pers.

Sukma, S. M. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019*. Universitas Islam Indonesia.

Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(1), 1–9.

Windriyanti, D. L. (2019). *Pengaruh PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Kebijakan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta*. Universitas Negeri Semarang.

Wiza, Y., & Puteri, H. E. (2023). Pengaruh PDRB perkapita terhadap disparitas pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2017 - 2021 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 49–63. <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7756>

Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati, R. (2020). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa 2010-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 603–615.